

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023**

JALAN SUROHADIKUSUMO NO. 1
PEMALANG , KODE POS 52312
TELP. (0284) 324657 PEMALANG

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023

Pemalang, 29 Juli 2022

**Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pemalang**



ABDULATIP, S.IP
NIP. 19620703 198607 1 001

DAFTAR ISI

halaman

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penyusunan	I-5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	II-7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD	II-7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	II-27
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	II-30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-33
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	II-45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	III-48
3.3 Program dan Kegiatan	III-49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-51
BAB V PENUTUP	V-59

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	II-11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD	II-28
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023	II-35
Tabel 2.4 Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	II-46
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang	III-49
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024	IV-53

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renja Dinpusarda tahun 2023	I-2
Gambar 2.1 Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan penjabaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang disusun berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan RKPD. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan penjabaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan; meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, orientasi mengenai Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal; meliputi tahap perumusan rancangan awal Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan tahap penyajian rancangan awal Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

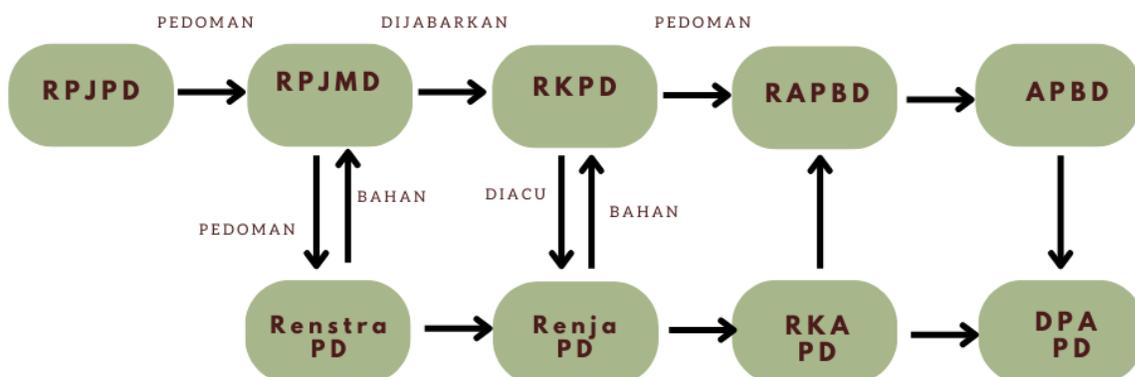
3. Penyusunan rancangan; meliputi kegiatan evaluasi rancangan awal Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, verifikasi dan penyelarasan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
5. Perumusan rancangan akhir; merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi rancangan akhir Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD.
6. Penetapan; meliputi kegiatan verifikasi rancangan akhir Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Dinpusarda Tahun 2023



Renja Dinpusarda tahun 2023 adalah penjabaran dari Renstra Dinpusarda tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2023 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pemalang 2005-2025.

Gambar 2.1
Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi pedoman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyusun RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 23);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 9);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);

24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah untuk merumuskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2023 berdasarkan penjabaran dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023.
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| A. Lembar Pernyataan Kepala PD | : | Lembar Pernyataan Kepala PD berisi pernyataan bahwa Renja PD yang disusun menjadi tanggung jawab Kepala PD untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, guna pencapaian target kinerja baik PD maupun kinerja daerah. |
| B. BAB I Pendahuluan | : | Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan |
| C. BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 | : | Pada bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat |
| D. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah | : | Bab ini berisi telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan |

- E BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah : Bab ini menjelaskan tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator. Target dan pagu indikatifnya untuk tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 sesuai dengan yang tertuang dalam SIPD
- F BAB V Penutup : Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 dan estimasi tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2021

Jumlah anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang sebesar Rp.4.643.332.000,00 yang terbagi dalam 3 program, 11 kegiatan dan 44 sub-kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp.4.392.118.910,00 atau sebesar 94,59%.

Tahun Anggaran 2022 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang sebesar Rp.4.563.383.000,00 yang terbagi dalam 4 program, 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp. 2.108.994.756 atau sebesar 66,43 %

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang realisasi capaiannya melebihi target, sesuai target dan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Dari 5 indikator program yang ada, terdapat 3 indikator program yang realisasinya melebihi target, 1 indikator program yang realisasinya sesuai dengan target dan 1 indikator program yang realisasinya tidak memenuhi target.
- b. Dari 11 kegiatan yang ada, terdapat 9 indikator kegiatan yang realisasinya sesuai dengan target dan 2 indikator kegiatan yang realisasinya tidak memenuhi target.
- c. Dari 44 sub kegiatan yang ada, terdapat 34 indikator sub kegiatan yang realisasinya sesuai dengan target, 10 Indikator sub kegiatan yang anggarannya direfocusing.

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan diantaranya adalah pada Program Pembinaan Perpustakaan terdapat kegiatan yang belum memenuhi target yaitu kegiatan pembudayaan gemar membaca. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat belum mencapai target. Target yang ditetapkan adalah 55,33 skor sedangkan realisasinya adalah 54,32 skor. Hal ini disebabkan karena masih dipengaruhi situasi dan kondisi pandemi covid-19, baik masyarakat maupun siswa tidak mengakses/membaca bahan pustaka di perpustakaan (layanan ditutup sementara dan kegiatan belajar mengajar di sekolah dilakukan secara daring karena dampak diberlakukannya PPKM). Selain itu, pada Program Pengelolaan Arsip terdapat kegiatan yang belum mencapai target yang ditentukan yaitu kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dari target yang ditentukan yaitu 500 berkas, realisasinya adalah 460 berkas dikarenakan arsip dinamis yang diolah hanya berjumlah 460 berkas dan tidak ada signifikansi pada kegiatan tersebut.

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1. Program Pembinaan Perpustakaan
 - a. Kegiatan Pengelolaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pengembangan Layanan Perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota
 - 3) Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota
 - b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - 3) Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 3) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - 4) Penyediaan bahan logistik kantor
 - 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- 7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Mebel
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Program Pengelolaan Arsip
- a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - 2) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
 - 3) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
 - c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota melalui JIKN
 - 1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
 - 2) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan adalah pada indikator program pembinaan perpustakaan yaitu persentase perpustakaan terstandarisasi dengan target 1,43% dan realisasinya yaitu 1,69%. Serta indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah nilai SAKIP dan nilai IRB yang melebihi target yang ditentukan yaitu 50,62 dan 63,39.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui faktor – faktor penyebab realisasi baik belum sesuai, sesuai maupun melebihi target. Hal ini dikarenakan:

1. Komitmen pemimpin di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;
2. SDM dan sarana prasarana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang cukup mendukung pencapaian target tersebut.

Hal-hal yang dilakukan ke depan adalah :

1. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan dan pelayanan publik sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan

kreatifitas untuk meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;

3. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen, pengendalian kegiatan dan SPIP ;
4. Meningkatkan kualitas SPIP serta sarana dan prasarana pendukung;
5. Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dinas/instansi terkait, kecamatan, pemerintahan desa dan masyarakat.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinpusarda Kabupaten Pemalang adalah Program dan Kegiatan dalam Renja Dinpusarda Kabupaten Pemalang mendukung tercapainya target program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada Renstra Dinpusarda Kabupaten Pemalang.

Masih terdapat capaian program/kegiatan yang tidak memenuhi target sehingga ke depan pelayanan perpustakaan dan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu ditingkatkan.

Adapun Langkah – Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan capaian program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan layanan perpustakaan elektronik/digital melalui aplikasi iPemalang.
2. Mengajukan nota dinas kepada Bupati Pemalang permohonan membuka layanan perpustakaan secara terbatas baik jam layanan, jumlah pengunjung maupun hari layanan
3. Mengoptimalkan akuisisi arsip.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021- 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program/Ke giatan/Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Ke giatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 (6/5*100)	8	9 (6+8)	10 (9/4*100)
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.23	Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan								
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan terstandarisasi	5,66	1,43	1,69	118,18	2,28	3,97	70,14
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	55,55	55,33	54,32	98,17	55,35	55,35	99,64

2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah perpustakaan daerah yang terstandarisasi	1	1	1	100,00	1	1,00	100,00
	Hasil Kegiatan	Persentase perpustakaan tingkat daerah yang terkelola	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jenis layanan iPemalang yang berkembang dan terpelihara	1	0	0	0,00	0	0,00	0,00
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tipe Perpustakaan Daerah	1	1	1	100,00	0	1,00	100,00
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah, desa, kecamatan dan taman baca masyarakat yang terbina	75	0	0	0,00	0	0,00	0,00

2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan OPD, ormas, lembaga keagamaan, ponpes yang terbina	75	0	0	0,00	0	0,00	0,00
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas perpustakaan	600	0	0	0,00	0	0,00	0,00
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan rujukan yang berkembang (unit)	1	1	1	100,00	1	1,00	100,00
		Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten yang berkembang	4	1	1	100,00	4	4,00	100,00
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang tersedia	38.625	1.225	1.225	100	0	1.225,00	3,17
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga	Jumlah database perpustakaan yang tersusun	4	4	4	100,00	0	4,00	100,00

	Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
	Keluaran Kegiatan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	55,55	55,32	54,32	98,19	55,35	55,35	99,64
	Hasil Kegiatan	Persentase capaian aktivitas pembudayaan gemar membaca dibanding target pada tahun berkenaan	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat yang dilaksanakan	15	0	0	0,00	0	0,00	0,00

2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Baca Masyarakat yang terbangun	5	0	0	0,00	1	1,00	20,00
		Jumlah Taman Baca Masyarakat yang terpelihara	5	0	0	0,00	0	0,00	0,00
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah penerima penghargaan gerakan budaya gemar membaca	24	1	1	100,00	0	1,00	4,17
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan literasi berbasis inklusi sosial	500	0	0	0,00	100	100,00	20,00
2.24	Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan								
2.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	48,68	48,58	50,62	104,20	48,60	48,60	99,84
		Nilai IRB	63,87	54,62	63,39	116,06	56,52	56,52	88,49
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

	Keluaran Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	60	10	10	100,00	10	20,00	33,33
	Hasil Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	12	3	3	100,00	2	5,00	41,67
2.24.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	6	1	1	100,00	1	2,00	33,33

2.24.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	6	1	1	100,00	1	2,00	33,33
2.24.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	6	1	1	100,00	1	2,00	33,33
2.24.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	6	1	1	100,00	1	2,00	33,33
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	18	3	3	100,00	3	6,00	33,33
2.24.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	6	1	1	100,00	1	2,00	33,33
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

	Keluaran Kegiatan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	32	1	1	100,00	2	3,00	9,38
	Hasil Kegiatan	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	21	23	23	100,00	21	22,00	104,76
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	6	1	1	100,00	1	2,00	33,33
2.24.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	6	1	1	100,00	1	2,00	33,33
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

	Keluaran Kegiatan	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	8	7	7	100,00	6	6,00	75,00
	Hasil Kegiatan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8	12	12	100,00	8	8,00	100,00
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	11	9/12	9/12	100,00	0	9,00	81,82
2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	9	9	9	100,00	9	9,00	100,00

2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	2	5	5	100,00	2	2,00	100,00
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	9	9	9	100,00	9	18,00	200,00
		Jumlah penggandaan yang tersedia	16659	7000	7000	100,00	7.000	14.000,00	84,04
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jenis surat kabar dan majalah yang tersedia	8	8	8	100,00	8	8,00	100,00
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	630	105	105	100,00	105	210,00	33,33
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	21	14	14	100,00		14,00	66,67
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	100	100	100	100,00		100,00	100,00

2.24.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	5	0	0		0	0,00	0,00
2.24.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	84	14	14	100,00	0	14,00	16,67
2.24.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	31	0	0		0	0,00	0,00
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	4	3	3	100,00	4	7,00	175,00
	Hasil Kegiatan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	3000	500	500	100,00	500	1.000,00	33,33

2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	4	4	4	100,00	4	4,00	100,00
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	24	23	23	23	24	24,00	100,00
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	177	56	56	100,00	49	105,00	59,32
	Hasil Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	144	22	22	100,00	24	46,00	31,94

2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	138	23	23	100,00	0	23,00	16,67
2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	2	1	1	100,00	2	3,00	150,00
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17,7	10	10	100,00	17,70	17,70	100,00
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah arsip dinamis yang terkelola	500	500	460	92,00	500	500,00	100,00
	Hasil Kegiatan	Persentase arsip dinamis yang terkelola	17,7	17,7	17,7	100,00	17,70	17,70	100,00
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang diciptakan dan digunakan	3000	500	500	100,00	500	1.000,00	33,33

2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	2760	460	460	100,00	460	920,00	33,33
		Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	276	46	46	100,00	46	92,00	33,33
		Jumlah arsip dinamis yang terpelihara	276	46	46	100,00	46	92,00	33,33
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	40	4	4	100,00	5	9,00	22,50
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah arsip statis yang terkelola	3000	500	500	100,00	500	1.000,00	33,33
	Hasil Kegiatan	Persentase arsip statis yang terkelola (%)	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
		Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	3000	500	500	100,00	500	1.000,00	33,33

2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota melalui JIKN								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah Aktivitas Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	2	0	0	0,00	1	1,00	50,00
	Hasil Kegiatan	Persentase Aktivitas Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	100	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam JIKD melalui SIKD (item)	18	1	1	100,00	3	4,00	22,22
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung pameran kearsipan (orang/kegiatan)	500	0	0	0,00	0	0,00	0,00

2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		8,39	NA	NA	NA	6,45	NA	0,00
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun								
	Keluaran Kegiatan	Jumlah arsip retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	5000	0	0	0,00	1000	1.000,00	20,00
	Hasil Kegiatan	Persentase arsip retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan (%)	26,9	0	0	0,00	N/A	N/A	N/A
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip retensi dibawah 10 tahun yang ditetapkan untuk dimusnahkan	5000	0	0	0,00	1000	1.000,00	20,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dan 2022 serta proyeksi Tahun 2023 dan 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pemalang

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nilai Budaya Literasi	%	-	√	-	23,46	24,12	24,80	25,66	22,38	24,12	24,80	25,66	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	skor	-	√	-	81,65	82,00	82,50	82,75	85,818	82,00	82,50	82,75	
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	angka	-	√	√	7,150	7,300	7,600	7,900	9,960	7,300	7,600	7,900	
4	SAKIP	skor	-	-	-	48,58	48,60	48,62	48,64	50,62	48,60	48,62	48,64	
5	IRB	skor	-	-	-	54,62	56,52	58,62	60,87	63,39	56,52	58,62	60,87	
6	Persentase Perpustakaan terstandarisasi	%	-	-	-	1,43	2,28	3,13	3,97	1,69	2,28	3,13	3,97	
7	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	-	-	√	55,33	55,35	55,45	55,50	54,32	55,35	55,45	55,50	
8	Persentase Naskah Kuno dan Budaya Etnis Nusantara yang dilestarikan	%	-	-	-	NA	55,50	55,50	55,50	NA	55,50	55,50	55,50	
9	Indeks Kearsipan	%	-	√	-	55,12	56,32	57,12	57,92	26	56,32	57,12	57,92	
10	Persentase OPD yang mampu mengelola Arsip dengan baik	%	-	√	-	10,00	22,50	40,00	60,00	17,40	22,50	40,00	60,00	
11	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	%	-	-	√	10,00	17,70	17,70	17,70	75	17,70	17,70	17,70	

12	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	%	-	-	√	6,45	6,45	7,10	7,48	4,16	6,45	7,10	7,48	
13	Persentase Penerbitan Ijin Penggunaan Arsip Tertutup	%	-	-	-	NA	100	100	100	NA	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan ruang lingkupnya (teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan); pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya (pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan); pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya (penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan); pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya (koordinasi dan fasilitasi di bidang perpustakaan dan kearsipan); pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Pemalang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2021, terdapat 7 (tujuh) indikator yang tidak mencapai target yaitu :

1. Angka kunjungan perpustakaan, hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid 19 sehingga pembelajaran dilaksanakan secara daring dan pelayanan perpustakaan tidak dilaksanakan.
2. Jumlah perpustakaan, hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran akan pentingnya perpustakaan.
3. Jumlah pustakawan, hal ini disebabkan masih rendahnya minat untuk menjadi pustakawan.
4. Persentase arsip yang dialihmediakan, hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana alih media yang tersedia.
5. Jumlah arsiparis, hal ini disebabkan masih rendahnya minat untuk menjadi arsiparis.
6. Persentase kearsipan yang diterbitkan naskah sumbernya, hal ini disebabkan belum dilaksanakannya kegiatan ini (target dan anggaran belum ada)
7. Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik, hal ini disebabkan belum tersedianya depo arsip yang sesuai ketentuan.

Sedangkan evaluasi penilaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang berdasar Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

- a. Nilai budaya literasi
- b. IKM kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- c. Indeks pembangunan literasi masyarakat
- d. Nilai SAKIP
- e. IRB
- f. Persentase perpustakaan terstandarisasi
- g. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
- h. Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan
- i. Indeks kearsipan
- j. Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik
- k. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja
- l. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban
- m. Persentase penerbitan izin penggunaan arsip tertutup

Nilai budaya literasi dihitung dari 3 (tiga) komponen, yaitu persentase penduduk yang baca cetak/elektronik, persentase penduduk yang akses internet dan persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/taman baca masyarakat. Pada tahun 2021 nilai budaya literasi sebesar 22,34% dengan kategori rendah, hal tersebut disebabkan baik masyarakat umum maupun siswa kurang mengakses/membaca bahan pustaka di perpustakaan (layanan ditutup sementara dan kegiatan belajar mengajar di sekolah dilakukan secara daring karena dampak dari diberlakukannya PPKM sebagai akibat dari situasi dan kondisi Covid-19). Sedangkan Indeks pembangunan literasi masyarakat terdiri dari 2 unsur yaitu pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat. Pada tahun 2021, indeks pembangunan literasi masyarakat Kabupaten Pematang Besar sebesar 9,960, angka ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh melebihi target yang ditentukan yaitu 7,150.

Tingkat kegemaran membaca dihitung berdasarkan hasil survei dengan indikator berupa : frekuensi membaca, durasi membaca dan jumlah bahan bacaan. Pada tahun 2021, nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat sebesar 54,32 masuk pada kategori sedang, namun belum mencapai target yang ditentukan, hal tersebut disebabkan baik masyarakat umum maupun siswa

kurang mengakses/membaca bahan pustaka di perpustakaan (layanan ditutup sementara dan kegiatan belajar mengajar di sekolah dilakukan secara daring karena dampak dari diberlakukannya PPKM sebagai akibat dari situasi dan kondisi Covid-19). Maka Perlu upaya lebih lanjut dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya agar tingkat kegemaran membaca masyarakat bisa meningkat. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah kondisi perpustakaan, sehingga perlu peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan. Standarisasi perpustakaan terbagi menjadi 5 (lima), yaitu perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum kabupaten/kota, perpustakaan khusus instansi pemerintah, dan perpustakaan desa/kelurahan. Pada tahun 2021, terdapat 1,68% perpustakaan sudah sesuai standart nasional atau sebanyak 20 perpustakaan.

Menurut Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Naskah kuno milik daerah yang dilestarikan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya sejumlah 8 eksemplar. Sedangkan koleksi budaya etnis nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 8 (delapan) unsur kebudayaan. Koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya sejumlah 50 eksemplar. Namun pada tahun 2021 tidak melaksanakan kegiatan ini dikarenakan adanya refocusing.

Indeks kearsipan diperoleh dari pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Pengawasan kearsipan eksternal diperoleh dari hasil penilaian Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten meliputi kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan. Pengawasan kearsipan internal diperoleh dari hasil penilaian Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan kepada OPD meliputi pengawasan sistem kearsipan internal, pengawasan pengelolaan arsip aktif dan pengawasan penyelamatan arsip statis internal. Capaian indeks kearsipan pada tahun 2021 adalah sebesar 26%. Hasil yang masih rendah ini disebabkan oleh nilai pengawasan arsip dinamis yang menurun. Pada tahun 2021 OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik sebanyak 17,40% atau sebanyak 15 OPD. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya harus lebih intens dalam membina dan mendampingi pengelolaan arsip OPD.

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja pada tahun 2020 sebesar 75%. Hasil ini melebihi target yang telah ditentukan. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban pada tahun 2020 sebesar 4,16%. Capaian yang rendah ini disebabkan pada tahun 2020 tidak ada bencana, perangkat daerah yang digabung atau dibubarkan sehingga tidak ada arsip yang diselamatkan serta tidak ada penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari IKM, nilai SAKIP dan IRB. Pada tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya mendapat IKM sebesar 85,818 (kategori B), nilai SAKIP sebesar 50,62 (kategori B) dan IRB sebesar 63,39 (kategori B) sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

- a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang Jaya untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
- b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
- c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Dinpusarda Kabupaten Pemalang. Renja Dinpusarda Kabupaten Pemalang disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Dinpusarda Kabupaten Pemalang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Method* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Material* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Dinpusarda Kabupaten Pemalang.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
			Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	NILAI SAKIP	48,62	3.374.175.284	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	NILAI SAKIP	3.398.927.784	
			NILAI IRB	58,62	839.207.716			NILAI IRB	839.207.716	
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang			52.280.284	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang		52.280.284	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	10.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10.000.000	

2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	5.000.000	
4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.999.772	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	4.999.772	
5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5.000.000	

6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	
7	Evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	17.280.512	Evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	17.280.512	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang			3.321.895.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang		3.346.647.500	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	3.314.185.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3.338.937.500	
9	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	4.460.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4.460.000	

10	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	3.250.000	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	3.250.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang			206.061.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang		206.061.200	
11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	156 Paket	5.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5.000.000	
12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	36 Paket	7.554.700	Penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	7.554.700	
13	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	60 Paket	104.650.500	Penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	104.650.500	
14	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36 Paket	18.053.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	18.053.500	

15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	96 Dokumen	18.412.500	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	18.412.500	
16	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	105 Laporan	52.390.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	52.390.000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang			422.590.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang		422.590.000	
17	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	500 Laporan	4.590.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4.590.000	
18	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 Laporan	100.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100.000.000	
19	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 Laporan	318.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	318.000.000	

5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang			210.556.516	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang		210.556.516	
20	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	32 Unit	112.318.620	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	112.318.620	
21	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	14.860.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14.860.000	
22	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	83.377.896	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	83.377.896	
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Persentase Perpustakaan terstandarisasi	3,13	275.000.000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Persentase Perpustakaan terstandarisasi	585.000.000	
			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	55,45				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		

6	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				131.251.000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			390.000.000	
23	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Perpustakaan Umum Kabupaten Pemalang, Taman Baca di Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Wisata, Desa dan Sekolah yang ada di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, Ulujami, Bodeh, Warungpring, Watukumpul, Randudongkal, Pulosari, Moga, Belik dan Bantar Bolang	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	4 layanan	131.251.000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Perpustakaan Umum Kabupaten Pemalang, Taman Baca di Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Wisata, Desa dan Sekolah yang ada di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, Ulujami, Bodeh, Warungpring, Watukumpul, Randudongkal, Pulosari, Moga, Belik dan Bantar Bolang	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	390.000.000	
7	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				143.749.000				195.000.000	

24	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 unit taman baca di igir kandang	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 perpustakaan	100.000.000	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 unit taman baca di igir kandang	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
25	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kelurahan Petarukan, Kelurahan Wanarejan Selatan, Desa Bantarbolong dan Desa Bojongan gka	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	4 perpustakaan	43.749.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	10 Desa kategori miskin yang memiliki perpustakaan desa di Kabupaten Pemalang	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	95.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17,7	65.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	165.000.000	
8	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				43.000.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			123.000.000	
26	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	500 Berkas	15.000.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	25.000.000	

27	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	460 berkas	14.500.000	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	79.500.000	
28	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	7 laporan	13.500.000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	18.500.000	
9	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				17.000.000	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			22.000.000	
29	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	OPD, Desa, Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 arsip	17.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	OPD, Desa, Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	22.000.000	
10	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				5.000.000	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			20.000.000	
30	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kabupaten Pemalang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	2 pengguna	5.000.000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kabupaten Pemalang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	20.000.000	

4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang	Tingkat Keutuhan dan Keberadaan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	7,1	10.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang	Tingkat Keutuhan dan Keberadaan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	10.000.000	
11	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				10.000.000	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			10.000.000	
31	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 arsip	10.000.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2023 tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan Dinpusarda Kabupaten Pemalang yang merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.4
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Pemangku
Kepentingan Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Rangking)
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 akan mengusung tema **Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Dengan 7 (tujuh) arah kebijakan prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2023 :

1. Menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,5 – 3 juta penduduk
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam hal kesehatan dan pendidikan
3. Menanggulangi pengangguran dan meningkatkan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi produksi dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas
6. Ekonomi hijau
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang merupakan tahun kedua RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **“Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur”** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana
2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul
3. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19
4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI)
5. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur
6. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil *gender* dan ramah anak.

Berkaitan dengan prioritas pembangunan tahun 2023 Kabupaten Pemalang tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Pematang Mendukung prioritas ke-2 yaitu Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang perpustakaan dan kearsipan, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perpustakaan dan kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang secara proaktif berperan dalam mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong melalui peningkatan budaya literasi di masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan birokrasi yang akuntabel.

A. Tujuan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang mempunyai 2 (dua) tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2021–2026, yaitu :

1. **“Meningkatkan budaya literasi di masyarakat”** yang diukur dengan indikator **nilai budaya literasi** dengan rumusan rerata dari persentase penduduk yang baca cetak/elektronik, persentase penduduk yang akses internet dan persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/taman baca masyarakat.
2. **“Meningkatkan birokrasi akuntabel”** yang diukur dengan indikator **indeks kearsipan** yang merupakan penilaian dari ANRI meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal.

B. Sasaran

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pematang mempunyai 3 (tiga) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2021–2026, yaitu :

1. **“Meningkatnya budaya literasi di masyarakat”** yang diukur dengan indikator **indeks pembangunan literasi masyarakat**. Unsur pembangunan literasi masyarakat, meliputi pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kecukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat/hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, dan anggota perpustakaan.
2. **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan”** yang diukur dengan indikator **persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik** dengan rumusan jumlah OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik dibagi jumlah OPD dikali 100%.

3. **“Meningkatnya pelayanan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan”** yang diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan** yang diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pengunjung perpustakaan.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang tahun 2023 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan budaya literasi di masyarakat		Nilai budaya literasi	%	24,80
		Meningkatnya budaya literasi di masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	7,600
		Meningkatnya pelayanan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indeks	82,50
2	Meningkatkan birokrasi akuntabel		Indeks kearsipan	Indeks	57,12
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan	Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik	%	40,00

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan mempertimbangkan faktor – faktor perumusan Program, Kegiatan dan sub kegiatan diantaranya adalah :

1. Menjabarkan/melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara sinergis dari pemerintah pusat dan provinsi.
2. Mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang tertuang dalam program unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Digital (Dedi), Desa Sinergi (Desi) dan Kota Industri (Koin).
3. Melaksanakan inovasi pelayanan publik di bidang Perpustakaan dalam rangka mendukung peningkatan SDM pada umumnya, peningkatan SPM, serta mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam pengentasan kemiskinan melalui Fasilitasi Pasca Baca yang terdapat pada sub kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.
4. Pembangunan SDM yang berkarakter budaya unggul.
5. Peningkatan pengelolaan arsip untuk menuju penataan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada tahun 2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang merencanakan sebanyak 4 program, 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang dengan kebutuhan dana sebesar Rp 4.563.383.000,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Dinpusarda telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, baik jenis program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DIMPUSARDA KABUPATEN PEMALANG

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2023. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Dimpusarda Kabupaten Pemalang yang akan dilaksanakan pada tahun 2023:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Pembinaan Perpustakaan
 1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Pemalang
 - c) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - d) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
 - e) Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka
 2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Perpustakaan di Tempat – tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

C. Program Pengelolaan Arsip

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
 - c) Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

D. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

1. Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
 - a) Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - a) Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang
dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2																		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	23										4.488.383.000						5.173.535.000	
2	23	01									4.213.383.000						4.201.285.000	
2	23	01	2,01								52.280.284						52.500.000	
2	23	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 Skor 48,62 Skor	2 Dokumen	100 %	10.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58,62 Skor 48,62 Skor	10.000.000
2	23	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 Skor 48,62 Skor	1 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58,62 Skor 48,62 Skor	5.000.000
2	23	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 Skor 48,62 Skor	1 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58,62 Skor 48,62 Skor	5.000.000
2	23	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 Skor 48,62 Skor	1 Dokumen	100 %	4.999.772	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58,62 Skor 48,62 Skor	5.000.000
2	23	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 Skor 48,62 Skor	1 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58,62 Skor 48,62 Skor	5.000.000

2	23	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 Skor 48,62 Skor	3 Laporan	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58,62 Skor 48,62 Skor	5.000.000
2	23	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang akuntabel dan tepat waktu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 Skor 48,62 Skor	1 Laporan	100 %	17.280.512	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58,62 Skor 48,62 Skor	17.500.000
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.321.895.000				3.323.185.000
2	23	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai IRB Nilai Sakip	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	48,62 skor 48,62 skor	23 Orang/Bul	a1n00 %	3.314.185.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai IRB Nilai Sakip	48,62 skor 48,62 skor	3.314.185.000
2	23	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai IRB Nilai Sakip	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	48,62 skor 48,62 skor	1 Laporan	100 %	4.460.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai IRB Nilai Sakip	48,62 skor 48,62 skor	5.000.000
2	23	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai IRB Nilai Sakip	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	48,62 skor 48,62 skor	1 Dokumen	100 %	3.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai IRB Nilai Sakip	48,62 skor 48,62 skor	4.000.000
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								206.061.200				248.258.700
2	23	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 Skor 48,62 Skor	156 Paket	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58,62 Skor 48,62 Skor	8.000.000
2	23	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 Skor 48,62 Skor	36 Paket	100 %	7.554.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58,62 Skor 48,62 Skor	7.554.700

2	23	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 Skor 48,62 Skor	60 Paket	100 %	104.650.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58,62 Skor 48,62 Skor	104.650.500
2	23	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 Skor 48,62 Skor	36 Paket	100 %	18.053.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58,62 Skor 48,62 Skor	18.053.500
2	23	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 Skor 48,62 Skor	96 Dokumen	100 %	18.412.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58,62 Skor 48,62 Skor	20.000.000
2	23	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 Skor 48,62 Skor	105 Laporan	100 %	52.390.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Dinpusarda Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	58,62 Skor 48,62 Skor	90.000.000
2	23	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								422.590.000				449.600.000
2	23	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai IRB Nilai Sakip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase jasa penunjang urusan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 skor 48,62 skor	500 Laporan	100 %	4.590.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai IRB Nilai Sakip	58,62 skor 48,62 skor	6.600.000
2	23	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai IRB Nilai Sakip	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	persentase jasa penunjang urusan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 skor 48,62 skor	48 Laporan	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai IRB Nilai Sakip	58,62 skor 48,62 skor	125.000.000
2	23	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai IRB Nilai Sakip	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	persentase jasa penunjang urusan daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 skor 48,62 skor	48 Laporan	100 %	318.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai IRB Nilai Sakip	58,62 skor 48,62 skor	318.000.000
2	23	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								210.556.516				376.000.000

2	23	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai IRB Nilai Sakip	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Persentase barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 skor 48,62 skor	32 Unit	100 %	112.318.620	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai IRB Nilai Sakip	58,62 skor 48,62 skor	120.000.000
2	23	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai IRB Nilai Sakip	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 skor 48,62 skor	23 Unit	100 %	14.860.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai IRB Nilai Sakip	58,62 skor 48,62 skor	20.000.000
2	23	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai IRB Nilai Sakip	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara	Persentase barang milik daerah yang diperlancar pelaksanaan tugas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	58,62 skor 48,62 skor	2 Unit	100 %	83.377.896	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai IRB Nilai Sakip	58,62 skor 48,62 skor	236.000.000
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								275.000.000				972.250.000
2	23	02	2,01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								131.251.000				415.000.000
2	23	02	2,01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Persentase perpustakaan terstandarisasi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Persentase perpustakaan tingkat daerah yang dikelola	Desa dan Sekolah yang ada di Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, Ulujami, Bodeh, Warungpring, Watukumpul, Randudongkal, Pulosari, Moga, Belik dan Bantar Bolang	55,45 Skor 3,13 %	7 Layanan	100 %	131.251.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Persentase perpustakaan terstandarisasi	55,45 Skor 3,13 %	415.000.000
2	23	02	2,02		Pemberdayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								143.749.000				557.250.000
2	23	02	2,02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Persentase perpustakaan terstandarisasi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Persentase capaian aktivitas pembudayaan gemar membaca dibanding target pada tahun berkenaan	1 Unit Taman Baca Wisata di Igir Kandang	55,45 Skor 3,13 %	1 Perpustakaan	100%	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Persentase perpustakaan terstandarisasi	55,45 Skor 3,13 %	500.000.000

2	23	02	2,02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Persentase perpustakaan terstandarisasi	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Persentase capaian aktivitas pembudayaan gemar membaca dibanding target pada tahun berkenaan	Kelurahan Petarukan, Kelurahan Wanarejan Selatan, Desa Bantarbolang dan Desa Bojongnangka	55,45 Skor 3,13 %	10 perpustakaan	100%	43.749.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Persentase perpustakaan terstandarisasi	55,45 Skor 3,13 %	57.250.000
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								75.000.000		395.000.000		
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								65.000.000		380.000.000		
2	24	02	2,01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								43.000.000		230.000.000		
2	24	02	2,01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Persentase arsip dinamis yang terkelola	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	17,70 %	500 Berkas	100 %	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17,70 %	45.000.000
2	24	02	2,01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Persentase arsip dinamis yang terkelola	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	17,70 %	460 Berkas	100 %	14.500.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17,70 %	90.000.000
2	24	02	2,01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah Laporan Hasil Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Persentase arsip dinamis yang terkelola	Kabupaten Pemalang	17,70 %	7 Laporan	100 %	13.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17,70 %	95.000.000
2	24	02	2,02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								17.000.000		65.000.000		
2	24	02	2,02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase arsip statis yang terkelola	OPD, Desa, Sekolah (SMP)	17,7 %	500 Arsip	100 %	17.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17,7 %	65.000.000
2	24	02	2,03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								5.000.000		85.000.000		
2	24	02	2,03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat daerah kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase Aktivitas Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	Kabupaten Pemalang	17,7 %	2 Pengguna	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17,7 %	85.000.000
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								10.000.000		15.000.000		
2	24	03	2,01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun								10.000.000		15.000.000		

2	24	03	2,01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Arsip retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	7,10 %	1000 Arsip	10.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	7,10 %	15.000.000
TOTAL												4.563.383.000		5.568.535.000		

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2023 ini adalah :

1. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023.
2. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra OPD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini merupakan acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun 2023.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang tahun 2023 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

LAMPIRAN



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050 / 351 / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kinerja Aturan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
 - b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan

- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
- b. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal : 4 April 2022.

BUPATI PEMALANG,

MUKTI AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 050/ 351 /TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota	
4.	Kepala Bidang Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota	Puryadi, A.Md
8.	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota	Sri Udayanti, S.H
9.	Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota	Tantri Nugrahandini, S.STP
10.	Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota	Dra. Maemunah
11.	Pengelola Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota	Uswatun Hasanah
12.	Pranata Laporan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang	Anggota	Endah Tri Yuniati, A.Md,Ak



**TABEL PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG**

Dasar:

1. Permendagri 90/2019 tentang Klakon Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verval Pemutakhiran Klakon Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verval dan Inventarisasi Pemutakhiran Klakon Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

NO	RENSTRA (Kepmendagri 050-3708)			SATUAN	RENJA (Kepmendagri 050-5889)			KETERANGAN	
	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	02.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2-23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	02.23.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			2-23.01.1.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
1	02.23.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	2-23.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	RUBAH Indikator Kinerja
2	02.23.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	dokumen	2-23.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	RUBAH Indikator Kinerja
3	02.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	dokumen	2-23.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	RUBAH Indikator Kinerja
4	02.23.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	dokumen	2-23.01.1.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	dokumen	RUBAH Indikator Kinerja
5	02.23.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	dokumen	2-23.01.1.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	dokumen	RUBAH Indikator Kinerja
6	02.23.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	dokumen	2-23.01.1.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	RUBAH Indikator Kinerja
7	02.23.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	dokumen	2-23.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2-23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

8	02.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	orang/bulan	2-23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	RUBAH Indikator Kinerja
9	02.23.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	dokumen	2-23.01.1.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	RUBAH Indikator Kinerja
10	02.23.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang tersusun	dokumen	2-23.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	laporan	RUBAH Indikator Kinerja
11	02.23.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	dokumen	2-23.01.1.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	dokumen	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
12	02.23.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	orang/kegiatan	2-23.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	orang	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2-23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
13	02.23.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	jenis/bulan	2-23.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	RUBAH Indikator Kinerja
14	02.23.01.2.06.02	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	unit	2-23.01.1.06.02	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	RUBAH Indikator Kinerja
15	02.23.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis/bulan	2-23.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	RUBAH Indikator Kinerja
16	02.23.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	jenis/bulan	2-23.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	RUBAH Indikator Kinerja
17	02.23.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia	jenis/bulan	2-23.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	RUBAH Indikator Kinerja
			Jumlah penggandaan yang tersedia	lembar					
18	02.23.01.2.06.06	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	jenis/bulan	2-23.01.1.06.06	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	dokumen	RUBAH Indikator Kinerja
19	02.23.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	orang	2-23.01.1.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	RUBAH Indikator Kinerja
20	02.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	kegiatan	2-23.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2-23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

21	02.23.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	unit	2-23.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit	RUBAH Indikator Kinerja
22	02.23.01.2.07.05	pengadaan mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	unit	2-23.01.1.07.05	pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket	RUBAH Indikator Kinerja
23	02.23.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	2-23.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2-23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
24	02.23.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	surat	2-23.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	RUBAH Indikator Kinerja
25	02.23.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	jenis/bulan	2-23.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	RUBAH Indikator Kinerja
26	02.23.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	jenis/bulan	2-23.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	RUBAH Indikator Kinerja
27	02.23.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga Non ASN yang dibayar setiap bulan	orang/bulan	2-23.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2-23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
28	02.23.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	unit	2-23.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	RUBAH Indikator Kinerja
29	02.23.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	unit	2-23.01.1.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	RUBAH Indikator Kinerja
30	02.23.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	2-23.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	RUBAH Indikator Kinerja
31	02.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	unit	2-23.01.1.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	RUBAH Indikator Kinerja
	2:23:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			2-23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
	02.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2-23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	02.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jenis layanan iPemalang yang berkembang dan terpelihara	jenis	2-23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	layanan	RUBAH Indikator Kinerja

	02.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tipe Perpustakaan Daerah	tipe	2-23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	perpustakaan	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah, desa, kecamatan dan taman baca masyarakat yang terbina	unit	2-23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan OPD, ormas, lembaga keagamaan, ponpes yang terbina	unit	2-23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas perpustakaan	orang	2-23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan rujukan yang berkembang	unit	2-23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	layanan	RUBAH Indikator Kinerja
Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten yang berkembang			layanan						
	02.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang tersedia	eksemplar	2-23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	eksemplar	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah database perpustakaan yang tersusun	data base	2-23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			2-23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	02.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jenis layanan iPemalang yang berkembang dan terpelihara	kegiatan	2-23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	lokus	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Baca Masyarakat yang terbangun	unit	2-23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	perpustakaan	RUBAH Indikator Kinerja
Jumlah Taman Baca Masyarakat yang terpelihara			unit						

	02.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah penerima penghargaan gerakan budaya gemar membaca	perpustakaan/penghargaan	2-23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	orang	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan literasi berbasis inklusi sosial	orang/kegiatan	2-23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	perpustakaan	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pemilihan duta baca tingkat kabupaten	orang	2-23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kejadiannya	orang	RUBAH Indikator Kinerja
	2:23:03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			2-23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
	02.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			2-23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			
	02.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	orang/kegiatan	2-23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia	naskah	2-23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	eksemplar	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2-23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	02.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang terseleksi dan tersedia	judul/eksemplar	2-23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	eksemplar	RUBAH Indikator Kinerja
	02.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang terolah	judul/eksemplar	2-23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	eksemplar	RUBAH Indikator Kinerja
	2:24:02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			2-24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
	02.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		berkas	2-24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			
	02.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang diciptakan dan digunakan	berkas	2-24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	berkas	RUBAH Indikator Kinerja

	02.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	berkas	2-24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	berkas	RUBAH Indikator Kinerja
			Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	berkas					
			Jumlah arsip dinamis yang terpelihara	berkas					
	02.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti	rekomendasi	2-24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan	RUBAH Indikator Kinerja
	02.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			2-24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			
	02.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	berkas	2-24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	arsip	RUBAH Indikator Kinerja
			Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	berkas					
	02.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			2-24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			
	02.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam JIKD melalui SIKD	berkas	2-24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	pengguna	RUBAH Indikator Kinerja
	02.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung pameran kearsipan	orang/kegiatan	2-24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	laporan	RUBAH Indikator Kinerja
	2:24:03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			2-24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
	02.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			2-24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			

	02.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip retensi dibawah 10 tahun yang ditetapkan untuk dimusnahkan	berkas	2-24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	arsip	RUBAH Indikator Kinerja
	02.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			2-24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			
	02.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang terselamatkan akibat bencana	berkas	2-24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	arsip	RUBAH Indikator Kinerja
	02.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			2-24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			
	02.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip OPD yang digabung yang terselamatkan	berkas	2-24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	daftar	RUBAH Indikator Kinerja
	02.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip OPD yang dibubarkan yang terselamatkan	berkas	2-24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	arsip	RUBAH Indikator Kinerja
	02.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah arsip desa/kelurahan yang mekar yang terselamatkan	berkas	2-24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	arsip	RUBAH Indikator Kinerja
	02.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			2-24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			

	02.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang diautensifikasi	berkas		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	arsip	RUBAH Indikator Kinerja
	02.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip hasil alih media	berkas		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	arsip	RUBAH Indikator Kinerja
	2:24:04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			2-24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
	02.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			2-24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			
	02.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP penggunaan arsip bersifat tertutup yang tersusun	dokumen	2-24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP	RUBAH Indikator Kinerja
	02.24.03.2.05.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Kabupaten/ Kota	Jumlah pengajuan izin penggunaan arsip bersifat tertutup yang dilayani	berkas	2-24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Kabupaten/ Kota	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	arsip	RUBAH Indikator Kinerja

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG**

ABDULATIP, S.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19620703 198607 1 001

02.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah arsip desa/kelurahan yang mekar yang terselamatkan	berkas	2-24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	arsip	RUBAH Indikator Kinerja
02.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			2-24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			
02.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang diautensifikasi	berkas		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	arsip	RUBAH Indikator Kinerja
02.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip hasil alih media	berkas		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	arsip	RUBAH Indikator Kinerja
02.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			2-24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
02.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			2-24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			
02.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP penggunaan arsip bersifat tertutup yang tersusun	dokumen	2-24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP	RUBAH Indikator Kinerja
02.24.03.2.05.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Kabupaten/ Kota	Jumlah pengajuan izin penggunaan arsip bersifat tertutup yang dilayani	berkas	2-24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Kabupaten/ Kota	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	arsip	RUBAH Indikator Kinerja

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PEMALANG

